

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan dibentuknya pemerintah Negara Indonesia dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pemerintah dalam mencapai tujuannya memberikan hak kepada rakyat untuk memperoleh kesejahteraan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 28H ayat 1 Undang-undang Dasar 1945, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” (Tangga Pustaka, 2007:33).

Kesejahteraan rakyat adalah suatu keadaan aman, selamat dan makmur, baik dalam kondisi jasmani maupun rohani yang dirasakan oleh segenap penduduk dalam suatu negara. Kesejahteraan rakyat mengandung makna kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin seluruh rakyat yang berisikan unsur kualitas beragama, tingkat pendidikan, kesehatan jasmani dan rohani serta pelayanan sosial.

Permasalahannya adalah kesejahteraan yang menjadi tujuan utama pemerintah belum dapat terealisasi dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan

masih banyaknya tingkat pengangguran dan kemiskinan yang melanda masyarakat, jika dikaji lebih lanjut kemiskinan adalah sebab utama dari perbuatan-perbuatan yang tidak bermoral dan kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemerasan, kebencian, dan kekejaman. Penyebab kesejahteraan belum tercapai adalah adanya pengaruh ekonomi global, kebijakan pemerintah yang sentralistis, fokus yang terlalu besar pada pemberian (*charity*), fokus pada pertumbuhan makroekonomi, pandangan kemiskinan yang berorientasi ekonomi, penempatan masyarakat sebagai obyek, dan anggapan bahwa masalah dan pengelolaan kemiskinan bersifat seragam diseluruh negeri.

Dampak lain dari kemiskinan adalah para pengusaha *real estate*, pemegang saham, pedagang dan hampir setiap orang bersaing untuk memenangkan pertandingan perebutan uang. Manusia cenderung semakin serakah dan menjadi makhluk yang mementingkan kepentingannya sendiri (*egois*). Banyak perusahaan dan para konglomerat menguasai perekonomian dan memainkan permainan serta menentukan ataupun menjatuhkan pihak-pihak lain yang dianggap menghalangi kemajuan mereka. Tidak jarang pula terjadi penindasan kepada orang-orang miskin yang menyebabkan jurang pemisah antara mereka semakin tinggi. Bagi mereka yang berhasil menjadi kaya, cenderung untuk mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan lingkungan dan orang-orang lain di sekitarnya.

Kesejahteraan yang menjadi tujuan setiap manusia memiliki berbagai macam definisi. Definisi kesejahteraan dalam sistem ekonomi kapitalis-konvensional merupakan konsep materilialis murni yang menafikan

keterkaitan rohaniyah. Akan tetapi, sebagian masyarakat menginginkan kesejahteraan lahir batin, yang berarti bahwa kesejahteraan yang diinginkan adalah tidak menafikan dan mempunyai ketersinggungan dengan aspek rohaniyah.

Konsep kesejahteraan yang memasukkan tujuan kemanusiaan dan kerohanian, tentu akan berakibat pada keharusan mendiskusikan secara ilmu ekonomi hakekat tujuan kesejahteraan tersebut dan bagaimana merealisasikannya. Tujuan-tujuan konsep kesejahteraan dalam kedua visi tersebut tidak hanya mencakup soal kesejahteraan ekonomi dalam arti materi semata, tetapi juga mencakup permasalahan persaudaraan manusia dan keadilan sosial-ekonomi, kesucian kehidupan, kehormatan individu, kehormatan harta, kedamaian jiwa dan kebahagiaan, serta keharmonisan kehidupan keluarga dan masyarakat (Gamal, 2006: _).

Kesejahteraan rakyat dapat dicapai dengan menjalani kehidupan yang bersih berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Rakyat dari suatu negara akan mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan dengan bebas dari kemiskinan apabila pemerintah dan pejabat lainnya berlaku jujur dan adil.

Kemiskinan menurut Buddha adalah suatu keadaan yang celaka dalam hidup ini, karena seseorang yang miskin akan memiliki 5 kesulitan, yaitu; 1) terlibat hutang, 2) harus membayar bunga, 3) dikejar-kejar untuk membayar kembali hutangnya, 4) kalau tidak dapat, menjadi bangkrut, dan 5) akhirnya harus masuk penjara (*A.III.351*).

Kekayaan yang ada bukanlah satu-satunya tolok ukur kebahagiaan, maka sebagian masyarakat mulai berpikir melalui cara pandang yang lain. Buddha setelah melihat akan bahaya dari paham materialisme, menerangkan tentang berbagai cara untuk mendapatkan kekayaan dan menggunakannya dengan jalan yang benar demi manfaat kehidupan ini dan kehidupan-kehidupan yang akan datang.

Buddha tidak memandang kesejahteraan materiil sebagai tujuan terakhir. Kesejahteraan materiil hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi dan luhur, yaitu memperoleh kebahagiaan *Nibbāna*. Oleh karena itu Buddha mengakui perlu suatu kesejahteraan materiil untuk mencapai sukses yang diharapkan (Sumedha, 2003:130).

Buddha menjelaskan tentang upaya pencapaian kesejahteraan materiil dan batin, bahwa ada empat hal yang berguna untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia ini, yaitu; 1) *utthāna-sampadā* yang berarti seseorang harus ahli, efisien, tekun dan giat dalam setiap pekerjaan dan mengerti pekerjaan yang dilakukannya dengan baik, 2) *ārakkha-sampadā*, yaitu seseorang harus pandai melindungi penghasilannya yang diperoleh dengan pekerjaan yang legal dan dengan mengucurkan banyak keringat, 3) *kalyāna-mitta*, yaitu mencari pergaulan yang baik, yang setia kepadanya, terpelajar, baik-budi, tidak kikir dan cerdas, yang akan dapat membantunya melalui jalan yang benar, jauh dari kejahatan, dan 4) *samajīvikata*, yaitu harus dapat hidup di dalam batas-batas kemampuannya.

Buddha menjelaskan empat hal yang baik dan berguna untuk mendapatkan kebahagiaan di alam selanjutnya, yaitu; 1) *Saddhā*, yang berarti harus mempunyai kepercayaan dan keyakinan yang kuat terhadap nilai-nilai moral, spiritual dan intelektual, 2) *Sīla*, yaitu menjauhkan diri dari pembunuhan, dari pencurian dan penipuan, dari perzinahan, dari ucapan-ucapan yang tidak baik dan dari minuman keras, 3) *Cāga*, yaitu suka menolong orang lain, baik hati dan tidak kikir, dan 4) *Paññā*, yaitu melatih diri dan mengembangkan kebijaksanaan yang akan membawanya ke arah pemusnahan dukkha, yaitu *Nibbāna* (A.II.66).

Berdasarkan deskripsi tentang kesejahteraan rakyat pada latar belakang masalah di atas, Penulis tertarik untuk menulis skripsi kajian pustaka dengan judul: Kesejahteraan Rakyat Menurut Pandangan Agama Buddha.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, Penulis merumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Konsep kesejahteraan rakyat menurut pandangan agama Buddha.
2. Cara-cara mewujudkan kesejahteraan rakyat menurut pandangan agama Buddha.
3. Pemanfaatan kekayaan menurut pandangan agama Buddha.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah Konsep kesejahteraan rakyat, Cara-cara mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan Pemanfaatan kekayaan yang ditinjau dari sudut pandang agama Buddha. Penulis dalam penelitian ini

membatasi permasalahan tentang Kesejahteraan rakyat menurut pandangan agama Buddha.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, dirumuskan masalah Bagaimana Kesejahteraan rakyat menurut pandangan agama Buddha?

E. Tujuan Penelitian

Mendeskripsikan Kesejahteraan rakyat menurut pandangan agama Buddha.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan informasi dan wawasan kepada masyarakat Buddhis dan umum serta memperkaya teori tentang kajian Kesejahteraan Rakyat Menurut Pandangan Agama Buddha.
 - b. Menambah wacana di perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Jinarakkhita.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan gambaran tentang Kesejahteraan Rakyat kepada umat Buddha.
 - b. Mampu memberi arahan kepada umat Buddha untuk mewujudkan Kesejahteraan Rakyat dan cara-cara mempergunakan kekayaan dengan benar dalam kehidupan sehari-hari menurut agama Buddha.